BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

a. Efisiensi Sistem

Efisiensi sistem merupakan kemampuan suatu sistem informasi dalam mendukung proses kerja secara optimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga, dan peralatan. Sistem yang efisien mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi pekerjaan manual yang berulang, serta meningkatkan konsistensi dan akurasi data. Melalui otomasi alur kerja, penyimpanan data terpusat, dan akses informasi yang lebih cepat, organisasi dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih produktif dan terstruktur dibandingkan dengan mekanisme manual.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, efisiensi sistem juga tercermin dari berkurangnya penggunaan dokumen fisik, tersingkatnya proses verifikasi dan pelayanan, serta meningkatnya kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan berbasis data real-time. Semakin tinggi tingkat efisiensi sistem, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

b. Kendala Teknis

Kendala teknis merupakan hambatan yang muncul akibat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana teknologi dalam mendukung operasional

sistem informasi. Kendala ini dapat berupa kualitas jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer dengan spesifikasi rendah, kapasitas server yang terbatas, hingga kompatibilitas perangkat lunak yang tidak selaras satu sama lain. Kondisi tersebut menyebabkan sistem berjalan lambat, sering mengalami gangguan, atau bahkan tidak dapat diakses pada waktu tertentu. Selain itu, kurangnya pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat juga dapat meningkatkan risiko gangguan operasional serta menurunkan kinerja sistem.

Kendala teknis ini tidak hanya menghambat kelancaran proses administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas pegawai dan kualitas layanan kepada masyarakat.

c. Kapasitas Teknis

Kapasitas teknis merujuk pada sejauh mana kemampuan infrastruktur, perangkat teknologi, dan sistem pendukung dapat menjalankan fungsi dan beban kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Kapasitas teknis mencakup kualitas dan spesifikasi perangkat keras, kemampuan jaringan, kapasitas penyimpanan data, kekuatan server, serta kompatibilitas perangkat lunak yang digunakan.

Ketika kapasitas teknis tidak memadai, sistem informasi dapat mengalami gangguan seperti respon lambat, crash, kesulitan integrasi, hingga kegagalan pemrosesan data dalam jumlah besar. Sebaliknya, kapasitas teknis yang baik memungkinkan sistem bekerja stabil, cepat, dan mendukung proses administrasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penilaian dan peningkatan kapasitas teknis menjadi penting untuk memastikan sistem informasi dapat

mendukung kebutuhan organisasi saat ini maupun pengembangannya di masa depan.

d. Keterbatasan Literasi Teknis

Keterbatasan literasi teknis merujuk pada rendahnya tingkat pemahaman dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan perangkat teknologi serta memanfaatkan sistem informasi secara optimal.

Dalam banyak organisasi, terutama instansi pemerintah, tingkat penguasaan teknologi antar pegawai masih beragam. Ada pegawai yang sudah mahir, namun tidak sedikit yang masih kesulitan menggunakan aplikasi dasar, melakukan input data digital, atau menyesuaikan diri dengan perubahan sistem baru.

Kondisi ini menyebabkan proses kerja menjadi lambat, ketergantungan pada rekan yang lebih memahami teknologi meningkat, dan pemanfaatan sistem informasi tidak mencapai efektivitas yang diharapkan.

Rendahnya literasi teknis umumnya disebabkan oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya pendampingan saat implementasi sistem baru, serta kebiasaan kerja manual yang masih dominan. Jika tidak ditangani dengan baik, keterbatasan ini dapat menghambat modernisasi administrasi, menurunkan produktivitas, dan memperlambat kualitas pelayanan organisasi.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorong Selatan, dalam upaya penguatan implementasi SIASN secara berkelanjutan.

Rekomendasi ini ditujukan untuk menjawab permasalahan mendasar yang ditemukan di lapangan, serta sebagai langkah strategis guna menyempurnakan pemanfaatan Sisitem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam mendukung tata kelola kepegawaian yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi**

   Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat, serta menyediakan perangkat kerja yang memadai seperti komputer, pemindai dokumen, dan akses sistem terproteksi. Hal ini penting agar sistem SIASN dapat berfungsi optimal dan tidak terhambat oleh kendala teknis.

2. **Penguatan Kompetensi Teknis Pegawai**

   BKPSDM perlu menyusun program pelatihan teknis yang menjangkau seluruh staf pengguna SIASN. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, disesuaikan dengan tingkat pemahaman pegawai, serta dilengkapi dengan pendampingan teknis dan pembentukan tim operator internal.

3. **Integrasi Sistem Lintas Instansi**

   Perlu dilakukan percepatan integrasi SIASN dengan sistem eksternal seperti BKN, Taspen, dan e-Kinerja. Hal ini bertujuan agar seluruh proses administrasi

ASN dapat dilakukan dalam satu sistem yang terpadu, mengurangi duplikasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

4. **Penyusunan SOP Teknis dan Pemutakhiran Data**

   BKPSDM disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) secara lokal, serta melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk menjaga akurasi dan integritas informasi ASN.

D. Produk Tesis

Produk utama yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah ***policy brief*** berjudul *"Penguatan Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) melalui Penyusunan SOP Teknis di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorong Selatan"*. *Policy brief* ini disusun berdasarkan hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis menjadi salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) secara optimal. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan ketidakteraturan proses kerja antar bidang, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) , serta lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan internal. Dalam policy brief ini, peneliti menawarkan solusi strategis berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis internal yang mengatur alur kerja pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur Sipil

Negara (SIASN) , pembagian peran antar bidang, mekanisme input dan verifikasi data, hingga sistem pelaporan dan monitoring.

Policy brief ini disusun sebagai kontribusi nyata dari penelitian, yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai acuan dalam menyusun kebijakan operasional internal, serta menjadi alat bantu manajerial dalam memperkuat tata kelola kepegawaian digital secara efisien dan terstandar. Selain itu, produk ini juga berpotensi untuk direplikasi di perangkat daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi sistem kepegawaian digital. Dengan demikian, policy brief ini menjadi bentuk integrasi antara hasil penelitian akademik dan kebutuhan praktis organisasi publik di tingkat daerah.